

URGENSI PENDIDIKAN MORAL SEBAGAI PEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BAIK

HENDRIZAL, S.IP., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat

E-mail: hendrizalsipmpd@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang perlunya diprogramkan pendidikan moral yang lebih luas sebagai pembentuk warga negara yang baik di Indonesia. Hal ini dengan tujuan menyiapkan generasi muda yang lebih bersih. Pendidikan moral yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara mengajarkan moral kepada seseorang agar ia bisa mengetahui sesuatu hal yang baik atau buruk dari apa yang dia lakukan, dan agar ia terhindar dari perilaku-perilaku yang melanggar moral. Melalui pendidikan moral dengan model-modelnya akan lebih terarah pembentukan moral generasi muda, karena akan menyentuh semua domain pendidikan, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dengan pendidikan moral itu diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas moral.

Kata kunci: pendidikan moral, model-model, warga negara yang baik.

A. PENDAHULUAN

Manusia Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara optimal. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan, mulai dari dalam keluarga, hingga lingkungan sekolah dan masyarakat.

Namun, di sisi lain, belakangan ini manusia Indonesia dilanda berbagai masalah moral. Berbagai masalah berikut ini menunjukkan gejala demikian. Kasus-kasus korupsi dalam skala besar, misalnya, marak terjadi di berbagai lembaga pemerintahan yang digerakkan

oleh manusia Indonesia. Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pelixa Lopez (2014:ix) menulis, kerugian keuangan negara Indonesia yang terkuras dan terserap akibat pemborosan dan korupsi mencapai angka yang cukup fantastis nilainya, yaitu Rp 347,75 triliun per tahun.

Selain itu menyeruak pula berbagai penyimpangan dan ketidakjujuran, berita-berita seputar terabaikannya etika berbisnis, banyaknya calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tertipuratusan juta oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, konsumen yang merasa tertipu oleh harga-harga yang ditawarkan *hypermart*, dan sebagainya.

Semua ini seolah-olah menjadi berita yang biasa di berbagai media cetak dan elektronika setiap harinya.

Moralitas dalam dunia pendidikan kita tidak kalah hebohnya. Sebagai misal, laporan mengenai revolusi seks remaja (*Koran Pendidikan*, 18 Desember 2005) mungkin akan membuat kita tersadar akan realitas dunia pendidikan kita dewasa ini, apalagi jika merenungkan data-data yang dimuat. Tindakan memalukan yang dilakukan oleh sebelas pelajar salah satu SMA negeri di Jawa Barat, misalnya, bukanlah semata-mata perkelahian atau adu mulut seperti yang biasa dilakukan oleh para siswa, melainkan adegan “pamali” seks yang terjadi di dalam ruang kelas. Ironisnya, sesuai dengan pengakuan pelaku dan beberapa saksi, tindakan tersebut telah dilakukan sejak lama. Lebih menyakitkan setelah diketahui bahwa ternyata seorang guru terlibat kegiatan seks bebas bersama mereka. Guru yang berinisial DS, pengajar biologi ayah tiga orang anak tersebut, sempat pula “mencicipi” muridnya sebelum menawarkannya kepada lelaki hidung belang. Sebelumnya, di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, juga dihebohkan dengan

kasus foto telanjang siswa kelas XII sebuah SMA negeri.

Berbagai upaya penyelesaian masalah moral sudah dilakukan. Misalnya, para koruptor sudah banyak yang ditangkap. Namun, berbagai kasus korupsi tetap marak. Agaknya, perlu dicatat, memerangi korupsi bukan cuma menangkapi koruptor. Sejarah mencatat, dari sejumlah kejadian terdahulu, sudah banyak usaha menangkapi dan menjebloskan koruptor ke penjara. Rezim Orde Baru, misalnya, kerap membentuk lembaga pemberangus korupsi. Mulai Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Komisi Empat pada 1970, Komisi Antikorupsi pada 1970, Opstib pada 1977, hingga Tim Pemberantas Korupsi. Nyatanya, penangkapan para koruptor tidak membuat jera yang lain. Koruptor junior terus bermunculan. “Mati satu tumbuh seribu,” begitu kata pepatah.

Salah satu kekeliruan pemberantasan korupsi selama ini adalah terlalu fokus pada upaya menindak para koruptor. Sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi. Salah satunya lewat upaya pendidikan antikorupsi. Terakhir, era reformasi melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

yang selain disertai tugas penindakan, juga bertugas melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, seperti pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.

Menyadari hal ini, tersembul gagasan memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tingkat SD hingga SMA, sebagai bentuk nyata pendidikan antikorupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Pendidikan antikorupsi itu bermaksud menyiapkan generasi baru penerus harapan bangsa yang lebih “bersih”. Namun, agaknya, untuk membentuk warga negara yang lebih baik, tidak cukup dengan program pendidikan antikorupsi yang spesifik seperti itu. Ke depan, perlu diprogramkan pula pendidikan yang lebih luas, yaitu pendidikan moral sebagai pembentuk warga negara yang baik di Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH

Menyimak uraian di atas, muncul tiga pertanyaan: *Pertama*, bagaimanakah hakekat pendidikan moral? *Kedua*, bagaimanakah model-model pendidikan moral? *Ketiga*, bagaimanakah persoalan pendidikan moral di dalam konteks sistem pendidikan Indonesia?

Dengan mengemukakan jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini bisa memberi wawasan kepada warga bangsa, sehingga memahami hakekat, model-model, dan persoalan pendidikan moral di dalam konteks sistem pendidikan Indonesia. Dengan begitu, tulisan ini juga diharapkan bisa bermanfaat dalam penyelenggaraan pendidikan moral yang efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas moral warga bangsa.

C. PENDIDIKAN MORAL

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena di manapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak.

Driyarkara mengatakan, “Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri”. Artinya, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke

taraf insani itulah yang disebut mendidik (Ditjen Dikti, 1983/1984:19).

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, “*paedagogie*”, yang akar katanya “*pais*” yang berarti anak, dan “*agian*” yang berarti membimbing. Dapat disimpulkan, *paedagogie* adalah bimbingan yang diberikan kepada anak, dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi “*education*” yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam diri anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang.

Pengertian pendidikan dalam *Dictionary of Education* adalah sebuah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup. Pendidikan juga diartikan sebagai proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum (Ditjen Dikti, 1983/1984:19).

Selanjutnya pengertian pendidikan juga pernah diatur dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1988, bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian de-

ngan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I pasal 1 ayat (1) menegaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari terjadinya proses pendidikan, ada dua segi yang harus dikembangkan, yaitu proses individu dan proses sosial. Dari segi proses individu, ditekankan kepada bagaimana mengembangkan semua kemampuan dasar yang dimiliki anak sejak lahir. Sedangkan dari proses sosial, pendidikan harus melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus.

Berdasarkan pendapat di atas, pendidikan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang manusia yang diberikan kepada manusia lainnya agar terjadinya perubahan dalam diri manusia ke arah hal yang positif. Berikutnya, pemahaman tentang pendidikan itu perlu dikaitkan dengan pengertian moral. Menurut Gunarsa (dalam Ali dan Asrori, 2006:136), “Kata ‘moral’ berasal dari bahasa Latin yaitu kata ‘*mos*’ atau ‘*mores*’ yang berarti kebiasaan, tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat”.

Santrock dan Yusan (dalam Mudjiran, dkk., 2007:96) mengemukakan, “Moral adalah kebiasaan atau aturan yang dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam artian, moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang diharuskan atau dihindari dalam menjalani kehidupan”. Sedangkan Kohlberg dan Piaget (dalam Mudjiran, dkk., 2007:96) mengatakan, “Moral itu meliputi tiga pengertian yang berbeda satu sama lain yaitu pandangan moral, perasaan moral, dan tingkah laku moral”.

Pandangan moral adalah pendapat atau pertimbangan seseorang tentang persoalan moral. *Pandangan moral* seseorang bagus apabila pertimbangannya dalam menelaah masalah atau persoalan moral sesuai dengan aturan-aturan dan etika yang berlaku. *Perasaan moral* adalah perasaan yang terjadi dalam diri seseorang setelah ia mengambil keputusan untuk bertingkah laku bermoral atau tidak bermoral. Apakah seseorang senang atau puas jika ia melakukan tindakan bermoral dan merasa bersalah setelah melakukan perbuatan melanggar moral. Bila seseorang merasa bersalah, tidak puas dan merasa berdosa setelah melakukan pelanggaran moral, berarti orang tersebut memiliki perasaan moral yang benar, dan jika orang tersebut merasakan hal sebaliknya berarti ia memiliki perasaan moral yang salah. *Tingkah laku moral* adalah tindakan yang sesuai dengan tindakan aturan-aturan etika moral. *Pandangan* atau pertimbangan perasaan moral yang benar akan mendorong seseorang untuk bertingkah laku bermoral. Namun dapat terjadi bila seseorang yang memiliki pertimbangan moral yang salah, akan mendorongnya bertingkah laku melanggar moral. Oleh karena itu, pengemba-

ngan moral perlu dilakukan secara serasi dan seimbang antara pengembangan pandangan moral, perasaan moral atau kesan moral, dan cara-cara bertingkah laku sesuai dengan aturan moral yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, moral adalah suatu pandangan tentang baik atau buruknya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Jika moral disandingkan dengan pendidikan, muncullah konsep pendidikan moral. Menurut Zuriah (2007:19), “Pendidikan moral adalah usaha untuk mengembangkan pola perilaku seseorang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Kehendak ini berwujud moralitas atau kesusilaan yang berisi nilai-nilai dan kehidupan yang berada dalam masyarakat”. Tujuannya adalah mengarahkan seseorang menjadi bermoral dan dapat menyesuaikan diri dengan tujuan hidup bermasyarakat.

Senada dengan itu, Zuchdi (2008:43) menulis, “Pendidikan moral adalah mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan perilaku yang baik, jujur, dan penyayang. Tujuan utama pendidikan moral adalah menghasilkan individu yang otonom (mandiri), yang memahami nilai-nilai

moral dan memiliki komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut”. Selanjutnya Zuchdi (2008:43) menyatakan, “Pendidikan moral itu mengandung beberapa komponen yaitu pengetahuan tentang moralitas, penalaran moral, perasaan kasihan dan memperhatikan kepentingan orang lain, serta tendensi (kecenderungan) moral”.

Pendidikan moral bisa dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung mulai dengan penentuan perilaku yang dinilai baik, sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya dengan memusatkan perhatian secara langsung pada ajaran tersebut. Sedangkan secara tidak langsung dimulai dengan menentukan perilaku yang baik dan dapat dipraktikkan. Untuk itu, tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat serta pemerintah sangat penting demi tercapainya pendidikan moral dengan baik.

Dapat disimpulkan, pendidikan moral adalah bagaimana cara mengajarkan moral kepada seseorang agar ia bisa mengetahui sesuatu hal yang baik atau buruk dari apa yang dia lakukan, dan agar ia terhindar dari perilaku-perilaku yang melanggar moral.

D. MODEL PENDIDIKAN MORAL

Pelaksanaan pendidikan moral ini sangat penting, sebab hampir seluruh masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, kini sedang mengalami patologi sosial yang sangat kronis. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat kita tercerabut dari peradaban easternisasi (ketimuran) yang beradab, santun dan beragama. Hal ini kiranya tidak terlalu aneh dalam masyarakat dan lapisan sosial di Indonesia yang hedonis dan menelan peradaban Barat tanpa seleksi yang matang.

Dalam upaya meningkatkan kematangan moral dan pembentukan karakter siswa secara optimal, maka penyajian materi pendidikan moral kepada para siswa hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi kepada semua pelajaran dan dengan menggunakan strategi dan model pembelajaran secara terpadu, yaitu dengan melibatkan semua guru, kepala sekolah, orangtua murid, tokoh-tokoh masyarakat sekitar.

Dengan demikian timbul pertanyaan, bagaimanakah merancang model pembelajaran atau pendidikan moral dengan menggunakan pendekatan terpadu? Setidaknya ada lima pendekatan dalam penanaman moral, yakni: pende-

katan penanaman nilai (*inculcation approach*), pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*), pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*), dan pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*).

1. Pendekatan Penanaman Nilai

Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Pendekatan ini sebenarnya merupakan pendekatan tradisional. Banyak kritik dalam berbagai literatur Barat yang ditujukan kepada pendekatan ini. Pendekatan ini dipandang indoktrinatif, tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi (Banks, 1985; Windmiller, 1976). Pendekatan ini dinilai mengabaikan hak anak untuk memilih nilainya sendiri secara bebas.

Menurut Raths, et.al. (1978), kehidupan manusia berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Kita tidak dapat meramalkan nilai yang sesuai untuk generasi yang akan datang. Setiap generasi mempunyai hak untuk menentukan nilainya sendiri. Oleh karena itu, yang

perlu diajarkan kepada generasi muda bukannya nilai, melainkan proses, supaya mereka dapat menemukan nilai-nilai mereka sendiri, sesuai dengan tempat dan zamannya.

2. Pendekatan Perkembangan Kognitif

Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi (Elias, 1989).

Tujuan yang ingin dicapai pendekatan ini ada dua hal utama. *Pertama*, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. *Kedua*, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, et.al., 1976; Banks, 1985).

Pendekatan perkembangan kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey (Kohlberg, 1971; 1977). Selanjutnya dikembangkan lagi oleh Piaget

dan Kohlberg (Fraenkel, 1977; Hersh, et.al., 1980). Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi tiga tahap (level) sebagai berikut: (1) Tahap “pre-moral” atau “preconventional”. Dalam tahap ini tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisik atau sosial. (2) Tahap “conventional”. Dalam tahap ini seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis, berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. (3) Tahap “autonomous”. Dalam tahap ini seseorang berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima kriteria kelompoknya.

Piaget berusaha mendefinisikan tingkat perkembangan moral pada anak-anak melalui pengamatan dan wawancara (Windmiller, 1976). Dari hasil pengamatan terhadap anak-anak ketika bermain, dan jawaban mereka atas pertanyaan mengapa mereka patuh kepada peraturan, Piaget sampai pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan kemampuan kognitif pada anak-anak mempengaruhi pertimbangan moral mereka.

Kohlberg (1977) juga mengembangkan teorinya berdasarkan kepada asumsi-asumsi umum tentang teori

perkembangan kognitif dari Dewey dan Piaget di atas. Seperti dijelaskan Elias (1989), Kohlberg mendefinisikan kembali dan mengembangkan teorinya menjadi lebih rinci. Tingkat-tingkat perkembangan moral menurut Kohlberg dimulai dari konsekuensi yang sederhana, yang berupa pengaruh kurang menyenangkan dari luar ke atas tingkah laku, sampai kepada penghayatan dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan universal. Lebih tinggi tingkat berpikir adalah lebih baik, dan otonomi lebih baik daripada heteronomi.

3. Pendekatan Analisis Nilai

Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral yang bersifat perseorangan. Jika dirangkum, ada sejumlah langkah

analisis nilai yang penting dan perlu diperhatikan dalam proses pendidikan nilai menurut pendekatan ini (Hersh, et.al., 1980; Elias, 1989), yaitu:

- a. Langkah analisis nilai tugas penyelesaian masalah
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan nilai yang terkait
- c. Mengurangi perbedaan penafsiran tentang nilai yang terkait
- d. Mengumpulkan fakta yang berhubungan
- e. Mengurangi perbedaan dalam fakta yang berhubungan
- f. Menguji kebenaran fakta yang berkaitan
- g. Mengurangi perbedaan kebenaran tentang fakta yang berkaitan
- h. Menjelaskan kaitan antara fakta yang bersangkutan
- i. Mengurangi perbedaan tentang kaitan antara fakta yang bersangkutan
- j. Merumuskan keputusan moral sementara
- k. Mengurangi perbedaan dalam rumusan keputusan sementara
- l. Menguji prinsip moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan
- m. Mengurangi perbedaan dalam pengujian prinsip moral yang diterima.

4. Pendekatan Klarifikasi Nilai

Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan ini memberi penekanan pada nilai yang sesungguhnya dimiliki seseorang.

Bagi penganut pendekatan ini, nilai bersifat subjektif, ditentukan oleh seseorang berdasarkan kepada berbagai latar belakang pengalamannya sendiri, tidak ditentukan oleh faktor luar, seperti agama, masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi penganut pendekatan ini, isi nilai tidak terlalu penting. Hal yang sangat dipentingkan dalam program pendidikan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai.

5. Pendekatan Pembelajaran Berbuat

Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*) memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu kelompok. Menurut Elias (1989), Hersh, et.al. (1980) dan

Superka, et.al. (1976), pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh Newmann, dengan memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa sekolah menengah atas (SMA) dalam melakukan perubahan-perubahan sosial.

Menurut Elias (1989), walaupun pendekatan ini berusaha juga untuk meningkatkan keterampilan “*moral reasoning*” dan dimensi afektif, namun tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada siswa, supaya mereka berkemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis.

E. KONTEKS INDONESIA

Sebetulnya, tujuan “pendidikan budi pekerti” di Indonesia adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri siswa. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam pendekatan penanaman nilai antara lain: keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan semacamnya.

Namun demikian, jika mencermati sistem pendidikan Indonesia selama ini, tampaknya cenderung lebih berorientasi pada pengisian kognisi yang ekuivalen dengan peningkatan IQ (*Intelligence Quotient*), walaupun juga di dalamnya terintegrasi pendidikan EQ (*Emotional Quotient*). Hal ini perlu disadari bersama. Padahal, sebetulnya ada warisan terbaik bangsa kita, yaitu tradisi spiritualitas yang tinggi, tetapi kemudian tergadai dan lebih banyak digemari oleh orang lain di luar negeri dengan sebutan SQ (*Spiritual Quotient*). Oleh sebab itu, perlu kiranya dalam pengembangan pendidikan moral ini eksistensi SQ terintegrasi dalam target peningkatan IQ dan EQ siswa.

Akibat dari hanyutnya SQ pada pribadi masyarakat dan siswa umumnya telah menimbulkan efek-efek sosial yang buruk. Berbagai macam masalah sosial dan moral yang timbul di Indonesia – seperti: 1) meningkatnya pemberontakan remaja atau dekadensi etika/sopan santun pelajar, 2) meningkatnya ketidakjujuran, seperti suka bolos, menyontek, tawuran antarpelajar dan suka mencuri, 3) berkurangnya rasa hormat terhadap orangtua, guru, dan figur-figur yang berwenang, 4) mening-

katnya kelompok teman sebaya (fenomena geng) yang bersifat kejam dan bengis, 5) munculnya kejahatan yang memiliki sikap fanatik dan penuh kebencian, 6) berbahasa tidak sopan, 7) merosotnya etika kerja, 8) meningkatnya sifat-sifat mementingkan diri sendiri dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara, 9) timbulnya gelombang perilaku yang merusak diri sendiri seperti perilaku seksual prematur, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba, serta perilaku bunuh diri, 10) timbulnya ketidaktahuan sopan santun – semua itu termasuk mengabaikan pengetahuan moral sebagai dasar hidup, seperti adanya juga kecenderungan untuk memeras, tidak menghormati peraturan-peraturan, dan perilaku yang membahayakan terhadap diri sendiri atau orang lain, tanpa berpikir bahwa hal itu salah (Koyan, 2000:74).

Semua itu semestinya memantik bangsa Indonesia untuk memperbaiki kualitas moral SDM-nya. Salah satu SDM yang dimaksud bisa berupa generasi muda (*young generation*). Sebagai estafet pembaharu, generasi muda merupakan kader pembangunan yang sifatnya masih potensial, perlu dibina dan dikembangkan secara terarah dan

berkelanjutan melalui lembaga pendidikan sekolah. Beberapa fungsi pentingnya pendidikan sekolah antara lain untuk: 1) perkembangan pribadi dan pembentukan kepribadian, 2) transmisi kultural, 3) integrasi sosial, 4) inovasi, serta 5) pra seleksi dan pra alokasi tenaga kerja. Dalam hal ini jelas, tugas pendidikan sekolah adalah untuk mengembangkan segi-segi kognitif, afektif dan psikomotorik yang dapat dikembangkan melalui pendidikan moral.

Dengan memperhatikan fungsi pendidikan sekolah di atas, maka setidaknya terdapat 3 alasan penting yang melandasi pelaksanaan pendidikan moral di sekolah, yaitu: (1) Perlunya karakter yang baik untuk menjadi bagian yang utuh dalam diri manusia yang meliputi pikiran yang kuat, hati dan kemauan yang berkualitas, seperti memiliki kejujuran, empati, perhatian, disiplin diri, ketekunan, dan dorongan moral yang kuat untuk bisa bekerja dengan rasa cinta sebagai ciri kematangan hidup manusia. (2) Sekolah merupakan tempat yang lebih baik dan kondusif untuk melaksanakan proses belajar mengajar. (3) Pendidikan moral di sekolah sangat esensial untuk mengembangkan SDM yang berkualitas

dan membangun masyarakat yang bermoral (Lictona, 1992:93).

Sesungguhnya, pendidikan budi pekerti memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan budi pekerti dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri.

Ki Hadjar Dewantara memiliki filsafat pendidikan yang kita kenal "*ing ngarso sung tulodho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani*" (keteladanan, motivasi dan pemberdayaan). Dalam rangka pendidikan nilai/budi pekerti, keteladanan merupakan cara atau metode yang penting bahkan mutlak untuk dilaksanakan. Maka untuk pendidikan ini, keteladanan dari para

orang dewasa (orangtua, guru, kakak, atasan, pembesar, dan sebagainya) mutlak untuk dihayati. Keteladanan itu dalam perilaku atau tindakan (apa yang dapat “dilihat”) dan kata-kata (apa yang dapat “didengarkan”). Tantangannya, bukankah masa kini muncul krisis keteladanan? (Ilahi, 2014:51-52). Apa yang “dilihat” tampaknya pada masa kini perlu memperoleh perhatian serius, misalnya siaran televisi (termasuk CD/-VCD), hiasan-hiasan di dinding, gambar-gambar iklan di jalanan, perilaku para orang dewasa, dan lainnya.

Demikian pula dengan apa yang “didengar”. Di zaman sekarang, orang biasa saja bermain sandiwara: di hadapan anak kelihatan baik; tetapi jika tidak dilihat anak, bertindak seenaknya (mengikuti selera sendiri). Ingat, bermain sandiwara tidak dapat bertahan lama, dan ketika orang tidak mampu bermain sandiwara, alias ia sudah hidup biasa dengan dan melalui perilaku tertentu, ia tidak dapat menyembunyikan diri (bersandiwara lagi). Dengan demikian apa yang ia lakukan, dengan mudah akan tersiarikan atau diceritakan dari mulut ke mulut, dan kemungkinan besar cerita itu sampai ke telinga orang/anak, kepada siapa sebenarnya ia

ingin menyembunyikan. Dan jika hal ini terjadi, akibatnya akan fatal. Hal ini misalnya muncul pada kasus penyelewengan suami/istri, korupsi dan sejenisnya. Di sinilah muncul tantangan berikutnya, yakni: hidup jujur dan disiplin.

Untuk merespon gejala kemerosotan moral tersebut, maka peningkatan dan intensitas pelaksanaan pendidikan moral di sekolah merupakan tugas yang sangat penting dan mendesak bagi kita, dan perlu dilaksanakan secara komprehensif dan dengan menggunakan strategi serta model pendekatan secara terpadu. Yaitu dengan melibatkan semua unsur yang terkait dalam proses pembelajaran atau pendidikan seperti guru-guru, kepala sekolah, orangtua murid dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan pendidikan moral tidak semata-mata untuk menyiapkan peserta didik menelan mentah konsep-konsep pendidikan moral, tetapi yang lebih penting adalah terbentuknya karakter yang baik, yaitu pribadi yang memiliki pengetahuan moral, peranan perasaan moral dan tindakan atau perilaku moral (Lictona, 1992:53).

Pada sisi lain, dewasa ini pelaksanaan pendidikan moral di sekolah diberikan melalui pembelajaran Pendi-

dikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama, tetapi masih tampak kurang pada keterpaduan dalam model dan strategi pembelajarannya. Selain itu, penyajian materi pendidikan moral di sekolah tampaknya lebih berorientasi pada penguasaan materi yang tercantum dalam kurikulum atau buku teks, dan kurang mengaitkan dengan isu-isu moral esensial yang sedang terjadi dalam masyarakat, sehingga peserta didik kurang mampu memecahkan masalah-masalah moral yang terjadi dalam masyarakat. Bagi para siswa, waktunya lebih banyak untuk menghadapi ulangan atau ujian, dan terlepas dari isu-isu moral esensial kehidupan mereka sehari-hari. Materi pelajaran PPKn atau PKn dirasakan sebagai beban, dihapalkan dan dipahami, tidak dihayati atau dirasakan, apalagi diamalkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Ide memasukkan materi anti-korupsi dalam kurikulum mendapat respons positif masyarakat. Hasil jajak pendapat harian *Seputar Indonesia* (27 Mei 2005) terhadap 400 responden, sebanyak 87% menyatakan perlunya memasukkan pendidikan antikorupsi

dalam kurikulum. Keyakinan masyarakat juga relatif besar. Hampir 200 responden menyatakan keyakinannya bahwa pendidikan antikorupsi bisa berjalan efektif membendung perilaku korupsi di Indonesia. Jajak pendapat itu menjangkit pula pendapat masyarakat seputar pentingnya pendidikan anti-korupsi. Masyarakat berharap pendidikan antikorupsi memberikan pengetahuan seputar korupsi dan bahayanya, mencetak SDM yang berkesadaran tinggi terhadap hukum, serta memutuskan mata rantai korupsi.

Lebih dari itu, masyarakat berkeinginan agar upaya pendidikan anti-korupsi berjalan paralel dengan upaya lainnya, yakni maksimalisasi penegakan hukum, fungsi pengawasan yang ketat, sosialisasi dan kampanye gerakan antikorupsi secara berkala dan berkesinambungan, dan menghilangkan praktik korupsi dalam birokrasi.

Pertanyaan yang muncul, haruskah pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran tersendiri? Mestinya tidak, sebab hal ini malah akan menyusahkan peserta didik. Saat ini peserta didik sudah demikian sesak dengan melimpahnya mata pelajaran yang harus dipelajari dan diujikan. Dikhawatirkan,

peserta didik akan terjebak dalam kewajiban mempelajari materi kurikulum antikorupsi. Akibatnya, materi pelajaran antikorupsi akan dirasakan sebagai beban, dihapalkan dan dipahami, tidak dihayati atau dirasakan, apalagi diamalkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Alhasil, bisa jadi yang akan muncul adalah kebencian dan antipati pada mata pelajaran antikorupsi. Bukannya pemahaman dan kesadaran antikorupsi. Di sinilah urgensi pendidikan antikorupsi lebih baik diarahkan kepada model pendidikan moral seperti diuraikan sebelumnya, dengan model-model yang ada. Artinya, pendidikan antikorupsi yang spesifik perlu dirancang untuk masuk ke dalam program pendidikan yang lebih luas, yaitu pendidikan moral sebagai pembentuk warga negara yang baik di Indonesia.

Pakar pendidikan Arief Rachman juga pernah menyatakan tidak tepat bila pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran khusus. Alasannya, karena siswa sekolah mulai SD, SMP, hingga SMA sudah terbebani sekian banyak mata pelajaran. Dari segi pemerintah, menurut Arief Rachman, akan berbuntut pada kesulitan-kesulitan,

seperti pengadaan buku-buku antikorupsi dan repotnya mencari guru antikorupsi. Menyikapi kesulitan tadi, menurut Arief Rachman, pendidikan antikorupsi lebih tepat dijadikan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu (Djabbar, 2007). Ini sebuah usulan yang mesti dicermati. Materi pendidikan antikorupsi nantinya bisa saja diselipkan dalam mata pelajaran PPKn atau PKn, matematika, bimbingan karir, bahasa. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu, juga nilai-nilai yang mengajarkan kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi.

Pendidikan antikorupsi bagi siswa SD, SMP dan SMA akhirnya memang mengarah pada pendidikan nilai. Yaitu pendidikan antikorupsi yang mendukung nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai, mengutip Franz Magnis-Suseno (dalam Djabbar, 2007), adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Menurut Franz Magnis-Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan

korupsi, yaitu kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.

Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi. Menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. Siswa perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang sangat buruk.

Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Franz Magnis-Suseno mengatakan, bersikap baik tetapi melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan.

Tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. Tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas. Misalnya, siswa diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab siswa terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin menyelesaikan kegiatan olahraga. Menurut Franz Magnis-Suseno, pengembangan rasa tanggung jawab adalah bagian terpenting dalam pendidikan anak menuju kedewasaan. Menjadi orang yang bermutu sebagai manusia.

Materi antikorupsi memang bisa kita selipkan sebagai pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Tetapi pertanyaan lain muncul: apakah pendidikan antikorupsi sekadar pemberian wawasan di domain kognitif? Pendidikan antikorupsi jelas bukan hanya berkutat pada pemberian wawasan dan pemahaman. Tidak sekadar menghafal. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penanaman nilai-nilai. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi perlu pula menyentuh domain afektif dan psikomotorik. Yaitu membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa, sekaligus menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi.

F. PENUTUP

Uraian terakhir di atas, sebetulnya sekali lagi ingin menegaskan betapa pentingnya pendidikan antikorupsi yang lebih baik diarahkan kepada model pendidikan moral dengan model-modelnya yang ada. Melalui pendidikan moral dengan model-modelnya itu akan lebih terarah pembentukan moral generasi muda, karena akan menyentuh semua domain pendidikan, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik.

Beberapa tahun lalu, sebetulnya KPK gencar mempromosikan dibentuk-

nya warung kejujuran di setiap sekolah. Warung kejujuran adalah warung yang menjual makanan kecil dan minuman. Warung kejujuran tidak memiliki penjual. Warung yang tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang dalam warung. Dalam warung tersedia kotak uang, yang berguna menampung pembayaran dari siswa yang membeli makanan atau minuman. Bila ada uang kembalian, siswa mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut.

Melalui warung kejujuran, siswa belajar berperilaku jujur. Siswa belajar bersikap taat dan patuh, ketika tidak ada orang yang mengawasi. Belajar jujur pada diri sendiri. Intinya, inilah sebuah pendidikan antikorupsi yang langsung menyentuh domain afektif dan psikomotorik. Belakangan ini, program warung kejujuran di setiap sekolah tersebut tidak ada gaungnya. Memang ada pendapat bahwa pembentukan moral dan karakter siswa melalui warung kejujuran di setiap sekolah tersebut menemui kegagalan karena menimbulkan fenomena kebangkrutan warung (Ilahi, 2014). Namun demikian, program tersebut perlu dipertimbangkan untuk dibuat keberlanjutannya lagi. Pembentukan

moral dan karakter generasi muda memang tidak dapat instan, tetapi melalui tahap demi tahap, beransur-ansur. Yakinlah, “tetes demi tetes air dapat melubang sebuah batu”, seperti dikatakan falsafah Kongfucu.

Berkaitan dengan pendidikan moral, tatacara pengajaran tradisional mestinya dihilangkan. Siswa bukan obyek. Siswa bukan kertas putih yang bisa ditulis apa saja. Siswa bukan botol kosong, di mana siswa diisi dengan segala macam informasi dan nasihat, dan setelah itu dituntut mengeluarkannya kembali. Bukan pendekatan seperti itu yang dibutuhkan.

Pendekatan ideal dalam pendidikan moral lebih berwujud penghargaan atas pendapat siswa guna merangsang kemampuan intelektual peserta didik, yaitu keingintahuan, sikap kritis, berani berpendapat. Karena itu, pola pendidikan moral seyogyanya bersifat terbuka, dialogis dan diskursif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad dan Muhammad Asrori. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Banks, J.A. 1985. *Teaching Strategies for the Social Studies*. New York: Longman.

- Djabbar, Faisal. 2007. "Kebal Korupsi." Jakarta: *Koran Tempo*, 9 Agustus 2007, artikel rubrik Opini.
- Elias, J.L. 1989. *Moral Education: Secular and Religious*. Florida: Robert E. Krieger Publishing Co., Inc.
- Fraenkel, J.R. 1977. *How to Teach about Values: An Analytic Approach*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Hendrizal. 2011. "Menyorot Moralitas Dunia Pendidikan." Padang: *Harian Singgalang*, 31 Mei 2011, artikel rubrik Opini, halaman A-9.
- Hendrizal. 2012. "Pendidikan dan Penguatan Moral." Padang: *Harian Singgalang*, 8 Mei 2012, artikel rubrik Opini, halaman A-9.
- Hersh, R.H., J.P. Miller & G.D. Fielding. 1980. *Model of Moral Education: An Appraisal*. New York: Longman, Inc.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2014. *Gagalnya Pendidikan Karakter: Analisis dan Solusi Pengendalian Karakter Emas Anak Didik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kohlberg, L. 1971. "Stages of Moral Development as a Basis of Moral Education." Dalam Beck, C.M., B.S. Crittenden & E.V. Sullivan. (Penyunting). *Moral Education: Interdisciplinary Approaches*. New York: Newman Press.
- Kohlberg, L. 1977. "The Cognitive-Developmental Approach to Moral Education." Dalam Rogers, D. *Issues in Adolescent Psychology*. New Jersey: Printice Hall, Inc.
- Koyan, I Wayan. 2000. *Pendidikan Moral: Pendekatan Lintas Budaya*. Jakarta: Depdiknas.
- Lictona, T. 1987. "Character Development in the Family." Dalam Ryan, K. & G.F McLean. *Character Development in Schools and Beyond*. New York: Praeger.
- Lopez, Felix da. 2014. *Jika Saya Presiden RI 2014-2019: Wilayah Indonesia akan Bertambah Luas*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Mudjiran, dkk. 2007. *Perkembangan Peserta Didik: Bahan Pembelajaran untuk Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah*. Padang: Universitas Negeri Padang Press.
- Raths, L.E., M. Harmin & S.B. Simon. 1978. *Values and Teaching: Working with Values in The Classroom*. Second Edition. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Superka, D.P. 1973. *A Typology of Valuing Theories and Values Education Approaches*. Doctor of Education Dissertation. Berkeley: University of California.
- Superka, D.P., C. Ahrens, J.E. Hedstrom, L.J Ford & P.L. Johnson. 1976. *Values Education Sourcebook*. Colorado: Social Science Education Consortium, Inc.
- Windmiller, M. 1976. "Moral Development." Dalam Adams, J.F. (Penyunting). *Understanding Adolescence: Current Developments in Adolescent Psychology*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Zuchdi, Darmiyati. 2008. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

✍️ hz